

ABSTRAK**Izin Presiden Atas Pemeriksaan Tindakan Maladministrasi Pejabat Negara
Dalam Konteks Prinsip HAM**

Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Para pejabat negara, dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang melakukan penyimpangan dalam bentuk maladministrasi. Terkait kepala daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan mekanisme khusus berupa izin Presiden apabila kepala daerah akan diperiksa. Penelitian meliputi: menentukan isu hukum, aturan hukum yang relevan, menganalisa dan menginterpretasikannya. Penelitian menghasilkan temuan :

1. Filosofi pemberian izin Presiden atas pemeriksaan tindakan maladministrasi pejabat negara terhadap perbuatan melawan hukumnya tidak dimaknai izin merupakan salah satu penghambat dalam proses penegakan hukum. Izin sebagai prosedur atau tata cara pemanggilan pejabat negara dihadapan aparat penegak hukum. Izin Presiden bermakna sebagai upaya preventieve instrument yang berkarakter specialiteitbeginsel. Izin berkaitan harkat, martabat dan harga diri pejabat negara sesuai Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Jadi, izin Presiden untuk pemeriksaan pejabat negara tetap diperlukan;
2. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia, saling menghormati antar hak asasi masing-masing orang, sesuai alinea ke empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hakikat HAM, pejabat negara sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Hal ini dapat diterima rasionalitasnya, karena penyelenggaraan tugas yang sangat luas harus diatur dalam undang-undang sesuai kebutuhan masyarakat (citizen friendly). Izin Presiden memuat prinsip HAM untuk menjaga harkat dan martabat pejabat negara dan pejabat lainnya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang;
3. Ratio decidendi pemberian izin pemeriksaan pejabat negara dan pejabat, menurut Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kecuali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-IX/2013 hanya menekankan frase “pemeriksaan” yang diujikan. Serta, ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi menurut penulis menggunakan penafsiran restriktif dengan varian penafsiran perbandingan dan sistematis dikhususkan untuk pengujian frase “izin Jaksa Agung”, sehingga terdapat inkonsistensi dalam memaknai frase “persetujuan/izin tertulis”.

Berdasarkan temuan disertasi disarankan tiga, yaitu: 1. Izin pemeriksaan pejabat negara tetap diperlukan dengan membuat peraturan perundang-undangan khusus mengenai tata cara diperlukannya izin pemeriksaan dan mengsinkronisasikan dengan undang-undang terkait lainnya; 2. Membentuk peradilan khusus dalam bentuk forum privilegiatum untuk pejabat negara dibawah Mahkamah Agung guna memberikan penghormatan atas kedudukan, harkat dan martabatnya. Melalui forum

DISERTASI

IZIN PRESIDEN ATAS...

M. SABARUDDIN S

ini, perkara akan cepat selesai, mengurangi biaya, pikiran, tenaga dan mengetahui bersalah atau tidak bersalah; dan 3. Aparat penegak hukum tetap memberitahukan kepada Presiden, bilamana ada pejabat negara yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Sistem presidensiil kedudukan Presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara.

Kata kunci: Izin, Pertanggungjawaban Presiden dan Hak Asasi Manusia.



Abstract

Presidential vergunning upon examination of maladministration Actions of state officials within the context of human rights principles

State administrator is state official who perform the function of the executive, legislative, or judicial, and other officials. State official, in carrying out its duties, often makes a deviation to their mandates and duties, which is termed maladministration. If the head of regional and local government is accused of maladministration, the Law number 32 of 2004 on Regional and Local Government establish a special judicial mechanism in forms of the need for presidential vergunning if the state officials are to be examined. This research examines legal issues, relevant legal rules and regulations, to analyze and interpret the need for and issuance of this presidential vergunning. This study leads to several research findings: 1. The philosophical underpinnings of the need for presidential vergunning for the examination of the state officials maladministration acts is found to prohibit the law enforcement processes; 2. The permit is understood as a procedure or processes for demanding a state official before law enforcement officers. Presidential Vergunning is to mean as a preventive action which is characterized as specialiteit beginsel. This permit is also associated with dignity and self-esteem of a state official under Article 28G (1) of the Constitution of 1945. Thus, Presidential vergunning for the examination of state officials is indeed required; and 3. Ratio decidendi for granting vergunning to inquire and examine state officials and other official according to the Constitutional Court is deemed contrary to Article 27 paragraph (1) and Article 28D (1) NRI Constitution of 1945, except the Constitutional Court Decision No. 55/PUU-IX/2013 which only emphasize the phrase "inspection" is being tested. As well, the three Constitutional Court decisions, according to the author, use grammatical interpretation, which lead to inconsistencies in the meaning of the phrase "consent/permission in writing".

Based on the study findings, this dissertation make three recommendations: 1. Presidential Vergunning to inquire and examine state officials is still needed, which hence calls for the need to create special legislation regarding the procedures for the issuance of presidential permit and to be synchronized with other related laws; 2. To establish a special court in the form privilegium forum under the Supreme Court to recognize and acknowledge the position, status and dignity of state officials. This forum will enable more efficient and faster case handling processes, so it will reduce the cost, thinking, energy and decision of guilt or innocence; and 3. Law enforcement officials to keep notifying and coordinating with the President, when there are state officials who allegedly committed an unlawful act. Since Indonesia adopts a presidential system, the president is the head of government and head of state.

Keywords: Permit, Presidential responsibility, human rights.

DISERTASI

IZIN PRESIDEN ATAS...

M. SABARUDDIN S